

**DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DI INDONESIA**



Skripsi Oleh

**ARIS SUGIARTO**

**01021281823169**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI**  
**INDONESIA**

Disusun Oleh:


Nama : Aris Sugiarto  
Nim : 01021281823169  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 4 Agustus 2022

  
Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP.196007101987031003

Tanggal : 06 Juli 2022

  
Anggota : Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si  
NIP :198506122015101101

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Disusun oleh :

Nama : Aris Sugiarto

Nim : 01021281823169

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Kajian/ Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 Oktober 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 12 Oktober 2022

Ketua

Anggota

Anggota

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 196007101987031003

Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si  
NIP.198506122015101101

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Nama : Aris Sugiarto  
Nim : 01021281823169  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”.

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
Anggota : Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si  
Tanggal Ujian : 12 Oktober 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 25 Oktober 2022

Penulis



Aris Sugiarto  
NIM.01021281823169



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul “Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya untuk memperoleh Strata satu (S-1) Ekonomi.

Skripsi ini membahas tentang deteksi ilusi fiskal pada lingkup pemerintah provinsi di Indonesia. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi, berkat dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada beberapa kekurangan dalam hasil karyanya, oleh sebab itu diharapkan kepada para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dimasa mendatang. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca.

Indralaya, 11 Oktober 2022

Penulis



Aris Sugiarto  
NIM. 01021281823169

## UCAPAN TERIMAKASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari kendala. Namun, kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia dalam penyusunan skripsi ini, serta kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Orangtua, Mas dan Mbak terimakasih atas doa, nasihat, perhatian dan dukungan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si dan Bapak Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing. Serta Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen penguji.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2018 dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 11 Oktober 2022  
Penulis



Aris Sugiarto  
NIM. 01021281823169

**ABSTRAK**  
**DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI**  
**INDONESIA**

**Oleh :**  
**Aris Sugiarto; Didik Susetyo; Abdul Bashir**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya ilusi fiskal pada pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia. Data panel digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 provinsi dengan rentang waktu 2015-2020. Analisis regresi digunakan untuk melihat adanya ilusi fiskal. Variabel-variabel yang digunakan adalah belanja daerah, PDRB, rasio PAD yang digunakan untuk belanja daerah, rasio DAU yang digunakan untuk belanja daerah, jumlah penduduk dan retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ilusi fiskal pada pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Terjadinya ilusi fiskal dapat diketahui melalui adanya variabel independen yang berkorelasi negatif terhadap belanja daerah dengan nilai yang signifikan. Variabel tersebut adalah variabel jumlah penduduk dan retribusi.

**Kata kunci : Ilusi Fiskal, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah**

Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP.196007101987031003

Anggota



Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si  
NIP.198506122015101101

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

**ABSTRACT**  
**FISCAL ILLUSION DETECTION ON LOCAL GOVERNMENTS IN  
INDONESIA**

**By :**  
**Aris Sugiarto; Didik Susetyo; Abdul Bashir**

This study aims to detect the existence of fiscal illusions in the provincial government in Indonesia. The panel data used in this study were 34 provinces with a time span of 2015-2020. Regression analysis is used to see the existence of fiscal illusions. The variables used are regional expenditure, GRDP, locally generated revenue ratio used for regional expenditure, general allocation fund ratio used for regional expenditure, population and retribution. The results of the study indicate that there is a fiscal illusion in the provincial government in Indonesia. The occurrence of fiscal illusions can be detected through the presence of independent variables that have a negative correlation with regional spending with a significant value. These variables are the population and retribution variables.

**Keywords: Fiscal Illusion, Regional Income, Regional Expenditure**

Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP.196007101987031003

Anggota



Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si  
NIP.198506122015101101

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aris Sugiarto  
Nim : 01021281823169  
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Utara /22 September 1998  
Alamat : RT/RW 002/005 Banjar Mulia  
Hobi : Membaca, Traveling

No. Handphone : 085832365365  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tinggi Badan : 176 cm  
Berat Badan : 68 kg  
Email : Arissugiarto148@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

- 2005 - 2011 : SD Negeri Banjar Mulia
- 2011 - 2014 : SMP Negeri 3 Baradatu
- 2014 - 2017 : SMA Negeri 1 Baradatu
- 2018 - 2021 : Jurusan Ekonomi Pembangunan,  
Fakultas Ekonomi,  
Universitas Sriwijaya

### Pengalaman Organisasi

- BO UKHUWAH FE UNSRI 2019-2021
- KEMALA UNSRI 2018-2020

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	13
1.3    Tujuan Penelitian .....	13
1.4    Manfaat Penelitian .....	14
1.4.1    Manfaat Akademis.....	14
1.4.2    Manfaat Praktis.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>15</b>
2.1    Landasan Teori .....	15
2.1.1    Teori Pengeluaran Pemerintah .....	15
2.1.2    Penerimaan Negara.....	18
2.1.3    Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.2    Konsep .....	21
2.2.1    Konsep Otonomi Daerah.....	21
2.2.2    Konsep Ilusi Fiskal .....	23
2.2.3    Deteksi Ilusi Fiskal .....	24
2.2.4    Pendapatan Asli Daerah .....	25

2.2.5	Belanja Daerah .....	25
2.2.6	Dana Alokasi Umum .....	26
2.3	Penelitian Terdahulu .....	26
2.4	Hubungan Antar Variabel .....	28
2.4.1	Hubungan PDRB Terhadap Belanja Daerah.....	28
2.4.2	Hubungan Rasio Pendapatan Asli Daerah yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	28
2.4.3	Hubungan Rasio DAU yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah.....	29
2.4.4	Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.....	30
2.4.5	Hubungan antara Retribusi terhadap Belanja Daerah.....	30
2.5	Kerangka Pemikiran .....	31
2.6	Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.2.1	Jenis Data .....	32
3.2.2	Sumber Data.....	32
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	33
3.4	Teknik Analisis.....	33
3.4.1	Analisis Regresi Data Panel .....	33
3.4.2	Uji Kesesuaian Model.....	35
3.4.3	Uji pemilihan Model.....	36
3.4.4	Uji Asumsi Klasik .....	38
3.4.5	Uji Hipotesis.....	40
3.5	Definisi Operasional Variabel .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>44</b>
4.1	Gambaran Umum .....	44
4.1.1	Kondisi Geografis Indonesia .....	44
4.1.2	Perkembangan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia .....	49
4.1.3	Perkembangan PDRB Menurut Provinsi di Indonesia .....	51

4.1.4	Perkembangan Rasio PAD yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Menurut Provinsi di Indonesia .....	52
4.1.5	Perkembangan Rasio DAU yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Menurut Provinsi di Indonesia .....	54
4.1.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia ..	56
4.1.7	Perkembangan Retribusi Daerah Menurut Provinsi di Indonesia ...	57
4.2	Analisis Data .....	58
4.2.1	Analisis Deteksi Ilusi Fiskal.....	58
4.2.2	Uji Pemilihan Model.....	61
4.2.3	Uji Asumsi Klasik .....	66
4.2.4	Uji Hipotesis.....	70
4.3	Pembahasan.....	72
4.3.1	Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Daerah .....	72
4.3.2	Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah .....	73
4.3.3	Pengaruh Rasio Dana Alokasi Umum yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	74
4.3.4	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah.....	75
4.3.5	Pengaruh Retribusi Terhadap Belanja Daerah .....	76
4.3.6	Deteksi Ilusi Fiskal.....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>78</b>
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen) .....	9
Tabel 1.2	Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen) .....	10
Tabel 4.1	Daftar Provinsi di Indonesia Hingga Tahun 2020.....	46
Tabel 4.2	Perkembangan Rata-Rata Per Tahun Belanja Daerah Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2015-2020.....	50
Tabel 4.3	Perkembangan Rata-Rata PDRB Per tahun Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2015-2020 .....	52
Tabel 4.4	Perkembangan Rata-Rata Rasio PAD yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2015-2020 .....	53
Tabel 4.5	Perkembangan Rata-Rata Rasio DAU yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2015-2020 .....	55
Tabel 4.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020 (Ribu Jiwa) .....	56
Tabel 4.7	Perkembangan Rata-Rata Retribusi Per tahun Menurut Provinsi di Indonesia Periode 2015-2020 .....	58
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Metode <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> , dan <i>Random Effect Model</i> .....	60
Tabel 4.9	Hasil Uji Chow .....	61
Tabel 4.10	Hasil Uji Hausman .....	61
Tabel 4.11	Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model .....	62
Tabel 4.12	Hasil Intersep .....	65
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70
Tabel 4.15	Hasil Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4.16	Hasil Uji F.....	72
Tabel 4.17	Hasil Uji t.....	72
Tabel 4.18	Penentuan Deteksi Ilusi Fiskal.....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi di Indonesia (Juta Rupiah).....	5
Gambar 1.2	Rasio PAD dan DAU yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Provinsi di Indonesia (Persen) .....	7
Gambar 1.3	Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi di Indonesia (Juta Rupiah). 9	
Gambar 2. 1	Kurva Pengeluaran pemerintah.....	18
Gambar 2. 2	Kurva Fungsi Produksi.....	19
Gambar 2. 3	Kerangka Pemikiran Analisis Deteksi Ilusi Fiskal .....	31
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas.....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> .....	86
Lampiran 2. Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> .....	87
Lampiran 3. Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> .....	88
Lampiran 4. Hasil Uji Chow .....	89
Lampiran 5. Hasil Uji Hausman .....	90
Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas .....	91
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas .....	91
Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	92
Lampiran 9. Hasil Perhitungan Intersep.....	93
Lampiran 10. Penerimaan Belanja Daerah Menurut Provinsi di Indonesia .....	94
Lampiran 11. Rasio Dari PAD yang Dialokasikan Untuk Belanja Daerah .....	95
Lampiran 12. Rasio Dari DAU yang Dialokasikan Untuk Belanja Daerah.....	96
Lampiran 13. Penerimaan PDRB menurut provinsi di Indonesia .....	97
Lampiran 14. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia .....	98
Lampiran 15. Penerimaan Retribusi Menurut Provinsi di Indonesia.....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi fiskal di Indonesia semakin gencar dilakukan setelah dimulainya periode reformasi. Sebelumnya sistem administrasi dan fiskal pemerintah dijalankan secara sentralistik atau terpusat. Kenyataannya sistem sentralistik yang begitu besar menimbulkan permasalahan pembangunan di daerah. Sistem sentralistik menjadi kurang efisien dalam proses pembangunan di daerah karena pemerintah pusat cenderung mengambil kebijakan yang sama kepada semua daerah yang sifatnya beranekaragam. Kebijakan tersebut juga mengabaikan potensi setiap daerah yang seharusnya dapat dikembangkan sesuai keunggulan setiap daerah.

Lemahnya sistem pemerintahan sentralistik secara nyata ditunjukkan pada peristiwa krisis ekonomi tahun 1997 dan pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan negara berkembang di dunia. Hal tersebut menjadi dasar banyak negara di dunia untuk mendevolusikan kekuasaan kepada sub-pemerintahannya atau disebut desentralisasi. Lebih dari 80 persen dari tujuh puluh lima negara berkembang telah menjalankan beberapa desentralisasi otoritas pada awal milenium. Gambaran yang hampir sama terjadi di negara maju, indeks kewenangan daerah yang dihitung oleh Hooghe *et al* (2010) untuk 42 negara demokrasi dan semi-



demokrasi mengungkapkan bahwa 70 persen negara telah melakukan desentralisasi sejak tahun 1950. Beralihnya negara-negara berkembang ke berbagai bentuk desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang mungkin untuk melepaskan diri dari jebakan pemerintahan yang tidak efektif serta ketidakstabilan ekonomi makro (Bird, 2016).

Fenomena desentralisasi yang terjadi di atas menjadi dasar terciptanya keseimbangan pemerintah pusat dan daerah di berbagai negara termasuk Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu di Indonesia telah menyebutkan bahwa peningkatan pembangunan nasional belum sepenuhnya dirasakan semua wilayah. Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu indikator pembangunan menjadi sangat terpusat. Implikasi dari hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan pembangunan di daerah yang seharusnya berkembang dengan berasaskan keadilan sesuai Undang-Undang. Ketidakpuasan tersebut timbul akibat pengendalian pemerintah pusat terhadap penghasilan dari sumber daya alam di daerah serta kurang sensitifnya pemerintah terhadap perbedaan antar daerah.

Adanya ketidakpuasan tersebut menjadi landasan perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang semula memiliki sistem sentralistik berubah kearah pemerintahan yang desentralistik (Simandjuntak, 2015). Adapun yang dimaksud sistem pemerintahan yang desentralistik yaitu bentuk sistem dalam pemerintahan dengan lebih mengutamakan fungsi daerah guna melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri. Sistem desentralistik ini menjadi populer seiring semakin terlihatnya kelemahan-kelemahan dalam

pelaksanaan sistem sentralistik. Sistem ini menggerakkan arah pembangunan di Indonesia dengan menempatkan peran pemerintah daerah sebagai tokoh utama, sehingga daerah secara langsung berperan lebih besar dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya sendiri. Peran yang besar tersebut didukung oleh pemanfaatan keuangan dan kekayaan alam yang lebih besar pengeolahannya oleh pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat. Asumsi dasarnya terlihat dimana masalah yang dihadapi suatu komunitas di dalam wilayah tertentu dianggap lebih dipahami pemerintah daerah. Alasan tersebut menjadi dasar perlunya mengatasi masalah pembangunan ekonomi dan sosial melalui pelaksanaan desentralisasi (Hidayat, 2008).

Pelaksanaan sistem desentralisasi sejatinya memerlukan sebuah kebijakan berupa perimbangan keuangan yang dilakukan oleh pusat terhadap daerah. Terhitung pada tahun 2000 telah diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Kebijakan yang diambil ini memiliki implikasi langsung melalui pendanaan pemerintah daerah yang semakin meningkat sehingga daerah dapat melaksanakan pembangunannya dengan maksimal. Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan dan mengurangi kesenjangan keuangan baik antara pusat dengan daerah (vertikal) maupun satu daerah dengan daerah lain (horizontal). Alasan itu mendasari pemerintah pusat membuat peraturan otonomi daerah yang

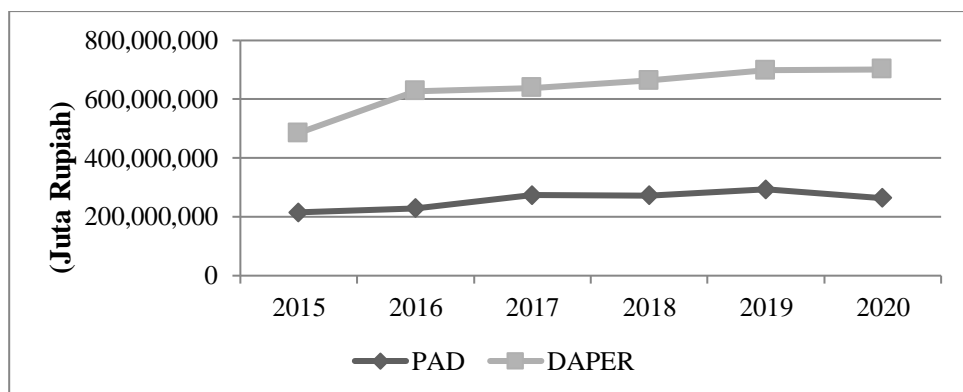
dituangkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai diberlakukannya perimbangan keuangan dengan dibentuknya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Undang-Undang tersebut menjadi wujud nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Beberapa alasan positif yang menjadi dasar dijalankannya otonomi daerah menurut Syarief dalam (Sjafrizal, 2018). Pertama, guna meningkatkan partisipasi politik di tingkat daerah. Kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangkap aspirasi di daerah. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerah. Unsur ini menjadi sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia hingga kini berjalan cukup lama. Berkaitan dengan itu Halim, (2001) menuliskan dalam bukunya bahwa suatu daerah dikatakan sudah mampu menyelenggarakan otonomi dan desentralisasi jika:

1. Kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini seharusnya daerah telah mampu menggali sumber pendapatan daerahnya, serta berwenang dalam pengelolaan. Pernyataan tersebut berarti suatu daerah diwajibkan dapat mengelola keuangan baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. penerimaan yang diperoleh dari pendapatan daerah tersebut selanjutnya dialokasikan sebagai pengeluaran yang dapat dilihat dari porsi belanja daerahnya.

2. Meminimalkan tingkat ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi prioritas utama sumber pendapatan dibanding pendapatan transfer. dengan begitu pemerintah daerah memiliki andil yang semakin besar dalam mengelola keuangan.

Kebijakan perimbangan keuangan yang dijalankan antara pusat dan daerah seharusnya sudah di posisi matang yang dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah melalui proporsi pendapatannya. Namun tekanan dalam pengumpulan PAD terletak pada tingginya ketergantungan keuangan daerah.



Sumber: Portal data (DJPK Kementerian Keuangan, 2020)

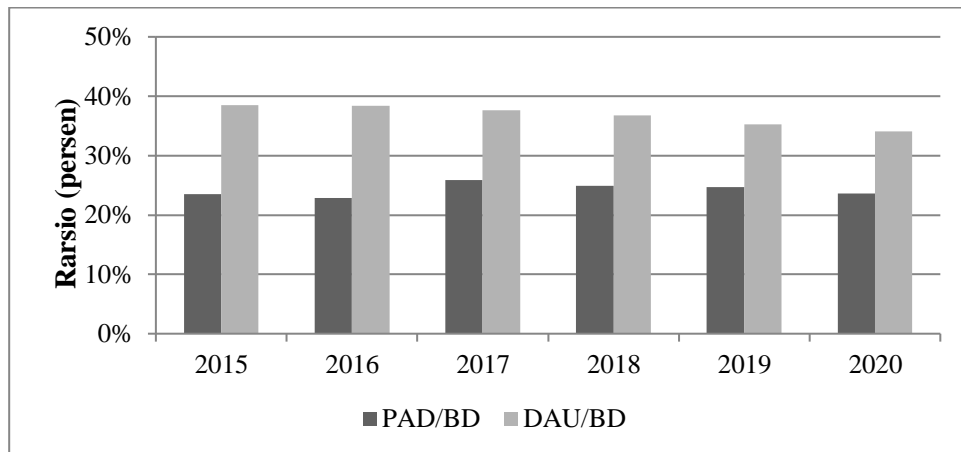
**Gambar 1.1 Perkembangan Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi di Indonesia (Juta Rupiah)**

Peningkatan PAD seharusnya dapat dioptimalkan dengan adanya transfer melalui dana perimbangan yang didapat pemerintah daerah dan kemudian sebagian besar dimanfaatkan dalam peningkatan belanja pemerintah daerah. Kenyataan lain menunjukkan bahwa peningkatan

penerimaan dana perimbangan belum begitu berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD.

Berdasarkan Gambar 1, setiap tahunnya penerimaan PAD mengalami perkembangan yang fluktuatif terutama pada kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Penerimaan ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan jumlah penerimaan dana perimbangan yang meningkat begitu cepat. Dana perimbangan meningkat sangat signifikan pada tahun 2016, namun penerimaan PAD provinsi di Indonesia hanya meningkat sedikit meskipun didorong oleh pendapatan dana transfer tersebut. Tahun 2017 penerimaan dana perimbangan setara dengan penerimaan PAD provinsi di Indonesia yang seharusnya dengan dana perimbangan sebesar itu dapat meningkatkan grafik penerimaan PAD provinsi di Indonesia menjadi lebih baik. Berbeda dengan sebelumnya, peningkatan dana perimbangan di tahun 2020 tidak berkontribusi terhadap kondisi pendapatan asli yang justru mengalami penurunan.

Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat selama ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adanya dana transfer diharapkan mampu meningkatkan PAD yang dapat direalisasikan melalui belanja daerah, namun data rasio dari PAD dan DAU yang digunakan untuk belanja daerah tahun 2015-2020 menunjukkan tren penurunan. meskipun demikian proporsi rasio dari DAU yang digunakan untuk belanja daerah jauh lebih besar setiap tahunnya.



*Sumber : Portal data (DJPK Kementerian Keuangan, 2020)*

**Gambar 1.2 Rasio PAD dan DAU yang Digunakan Untuk Belanja Daerah Provinsi di Indonesia (Persen)**

Rasio PAD yang digunakan untuk belanja pemerintah provinsi di Indonesia masih tergolong rendah di bawah 25 persen setiap tahunnya. Data enam tahun terakhir menunjukkan rasio ini belum mampu berkembang ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan rasio DAU yang digunakan untuk belanja daerah yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Kenyataan tersebut mengartikan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia dalam enam tahun terakhir terus berusaha melepas ketergantungan dana transfer untuk belanja pembangunan di daerahnya. Namun meskipun mengalami penurunan, rasio DAU yang digunakan untuk belanja daerah masih lebih tinggi dibanding rasio PAD yang digunakan untuk belanja daerah.

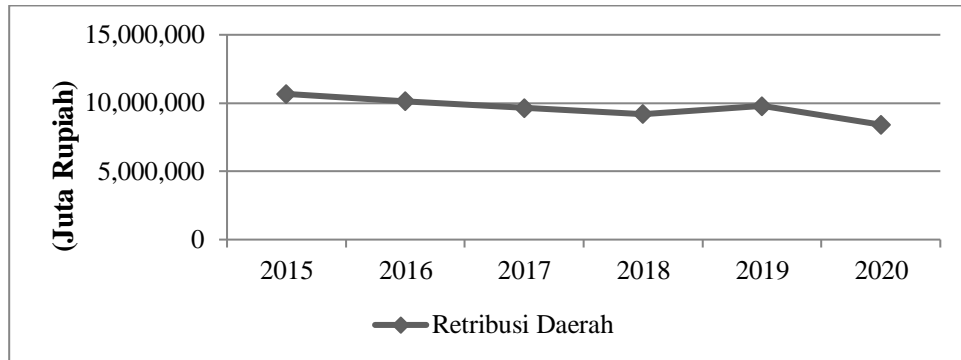
Peningkatan belanja daerah guna membiayai pembangunan juga didukung oleh penerimaan PDRB. Semakin meningkatnya penerimaan PDRB suatu daerah, semakin meningkat pula penerimaan di daerah secara lebih optimal (Sasana, 2011). Melalui penerimaan daerah yang semakin

meningkat baik PAD maupun dari dana transfer pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dalam upaya pembiayaan program-program pembangunan di daerah. Oleh sebab itu terdapat hubungan yang searah antara belanja daerah dengan PDRB. Hal tersebut pernah diteliti oleh Gorahe *et al.*, (2014) yang menyebutkan bahwa bahwa belanja daerah dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB. Semakin meningkatnya penerimaan PDRB di daerah, akan semakin meningkatkan potensi sumber penerimaan di daerah tersebut.

Besarnya pengeluaran belanja daerah secara langsung juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu 6 bulan atau seseorang yang berpindah ke suatu tempat kurang dari enam bulan tetapi berencana menetap di wilayah tersebut. Jumlah penduduk ternyata berpengaruh terhadap belanja daerah. Sasana, (2011) menyebutkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap peningkatan barang publik berupa sarana dan prasarana umum yang semakin banyak diperlukan, baik dilihat dari aspek jumlah ataupun kualitas. Hasil selaras didapatkan Liando, (2017) yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk diperlukan pula biaya atau anggaran yang tinggi yang direpresentasikan oleh belanja daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan. Namun

dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan retribusi secara keseluruhan di tingkat provinsi di Indonesia menunjukkan tren menurun.



Sumber : portal data (djkp kemenkeu, 2020)

**Gambar 1.3 Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi di Indonesia (Juta Rupiah)**

Penerimaan retribusi daerah di tingkat provinsi seperti dilihat pada Gambar di atas menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan mencapai 10 Triliun Rupiah, akan tetapi penerimaan tersebut masih yang tertinggi dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 8,4 Triliun Rupiah. Kondisi ini seakan menunjukkan kurangnya usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli di daerahnya melalui retribusi.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen)**

Tahun	Belanja Daerah	Persentase
2015	250.122.383	-
2016	263.828.374	5,48%
2017	320.240.124	21,38%
2018	326.386.384	1,92%
2019	355.681.654	8,98%
2020	335.624.772	-5,64%

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020



Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara nominal, kecuali tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar. Tahun 2015 belanja daerah adalah 250 Triliun Rupiah kemudian menjadi 335 Triliun Rupiah pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 21,38 persen, Sayangnya pengeluaran mengalami tren yang fluktuatif meskipun jumlah nominalnya meningkat. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar - 5,64 persen.

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Berdasarkan rasio kemandirian daerah menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020 masih di bawah 50 persen dan dikategorikan rendah.

**Tabel 1.2 Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen)**

Tahun	PAD	Dana Transfer Transfer	Rasio Kemandirian	Keterangan
2015	215.376.546	485.276.827	44%	Rendah
2016	229.340.355	627.115.975	37%	Rendah
2017	274.032.670	638.976.079	43%	Rendah
2018	272.981.059	663.249.196	41%	Rendah
2019	293.659.554	697.953.796	42%	Rendah
2020	263.964.640	752.155.850	35%	Rendah
Rata-rata			<b>40%</b>	<b>Rendah</b>

*Sumber: DJPK Kemenkeu, 2020 (data diolah)*

Kondisi persentasenya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2020 menjadi tahun dengan persentase tingkat kemandirian provinsi terendah dengan besaran 35 persen. Hal tersebut

terjadi akibat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan yang masih kecil dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat serta belum tergolong mampu mencukupi kebutuhan daerah sendiri.

Melihat beberapa tren data yang disajikan dengan meningkatnya pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah kenyataannya belum begitu berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan PAD melalui belanja daerah. Pemerintah daerah justru lebih menggantungkan diri terhadap dana transfer tersebut. kenyataan ini mengindikasikan bahwa daerah belum sepenuhnya menggali potensi pendapatan asli di daerahnya. Belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan pendapatan daerah, oleh sebab itu perlunya alokasi belanja pemerintah daerah yang lebih optimal.

Penelitian Pratami, (2017) menemukan bahwa adanya transfer berupa transfer pemerintah pusat masih hanya dimanfaatkan sebagai substitusi penerimaan pemerintah daerah dengan mengabaikan sumber asli daerah di wilayah penelitiannya. Penelitian serupa didapati oleh Yusuf *et al.*, (2021) Ilusi fiskal dapat dibuktikan terjadi pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur. Munculnya ilusi fiskal menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten di Jawa Timur belum mengalokasikan pendapatannya

secara efisien. Daerah kurang serius dalam mengoptimalkan pendapatan aslinya dengan lebih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Adi *et al*, (2006) menegaskan bahwa ketika pemerintah daerah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat, guna membiayai pendanaan belanja daerah, muncul sebuah pendapat mengenai pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespon pendapatan dana transfer tersebut secara asimetris. Pengeluaran dari dana transfer sangat menguntungkan penerimaan pemerintah daerah, namun di lain hal anggaran pendapatan juga menurun dapat diidentifikasi terjadi tindakan asimetris tersebut. Pemerintah daerah justru lebih memanfaatkan dana perimbangan untuk sumber pendapatan utama pendapatan daerah dibanding lebih mengusahakan penggalian PAD sebagai basis unggulan penerimaan daerah.

Pemberian dana transfer ke daerah yang tidak sejalan dengan penerimaan daerah tersebut dapat diindikasikan adanya ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Penerimaan pemerintah seharusnya dapat mendasari peningkatan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Kondisi tersebut kemudian menjadi menguntungkan penerimaan pemerintah melalui peningkatan pendapatan asli di kemudian hari (Worthington *et al.*, 1996). Jika berlaku demikian, terjadi pola hubungan searah berupa peningkatan penerimaan terhadap peningkatan pengeluaran. Jika terjadi hubungan yang tidak searah disebut dengan ilusi fiskal, yang mana pemerintah daerah cenderung memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat secara asimetris dalam pemanfaatannya guna meningkatkan pendapatan.

Indikasi adanya tindakan asimetris yang dilakukan pemerintah daerah yang dalam hal ini pengelolaan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat merupakan suatu indikasi yang perlu dibuktikan secara empiris. Kinerja pemerintahan daerah dengan terjadi atau tidaknya ilusi fiskal menjadi hal menarik untuk diteliti lebih dalam. Hal ini perlu dilihat karena pentingnya meningkatkan pendapatan asli melalui dana perimbangan sesuai asas otonomi daerah. Alasan tersebut menjadi dasar penelitian untuk mendeteksi ilusi fiskal di lingkup pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pengaruh PDRB, Rasio dari PAD yang digunakan untuk Belanja Daerah, Rasio dari DAU yang digunakan untuk Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Retribusi terhadap Belanja Daerah.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis adanya pengaruh PDRB, Rasio dari PAD yang digunakan untuk Belanja Daerah, Rasio dari DAU yang digunakan untuk Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Retribusi terhadap Belanja Daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah dan tujuan, dapat ditentukan manfaat dalam penelitian ini antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi keuangan publik khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai kajian deteksi ilusi fiskal.
- b. Memberikan gambaran bagaimana dana transfer, pendapatan asli dan penduduk mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Serta menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Menjadi hasil penelitian ini sebagai alat pertimbangan bagi daerah supaya pengambilan sikap pelaksanaan otonomi daerah dengan lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama melalui aspek pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009a). Fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah. *6*(33).
- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009b). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *6*(1), 1–19. <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01>
- Adi, P. H. (2006). Bidang : Akuntansi Sektor Publik Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah ,. *Paper Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 23–26.
- Aprianti, Y. (2020). Deteksi ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah di sulawesi tengah Detection of fiscal illusions in local government budget performance in central (Vol. 22, Issue 1).
- Azwar. (2016). Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy. *Kajian Ekonomi Keuangan*, *20*(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *Journal of Political Economy*, *98*(5, Part 2), S103–S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Bhakti, A. (2013). Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi(Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan). *1*(2), 71–80.
- Bird, R. M. (2016). Decentralization in Developing Countries. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Third Edition*, 770–775. <https://doi.org/10.1081/e-epap3-120035880>
- Boediono. (1998). *teori pertumbuhan ekonomi*. BPFPE.
- BPS. (2019). *Ekonomi Sumatra Masih Tergantung Alam*.

<https://www.bps.go.id/news/2019/07/22/302/ekonomi-sumatra-masih-tergantung-alam.html>

Damodar N., G. dan D. C. P. (2012). *Dasar - dasar Ekonometrika Buku 2* (5th ed.). Salemba 4.

Devita. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70.

DJPK kemenkeu. (2020). *portal data*. Retrieved October 27, 2021, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

DJPK kemenkeu. (2020). *postur APBD*. DJPK Kemenkeu. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Dumairy. (2006). *perekonomian indonesia*. erlangga.

Gemmell, N., Morrissey, O., & Pinar, A. (2010). Taxation , Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK : a Time-Series Analysis. *Discussion Paper*, 1–28.

Gorahe, I., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5650>

Halim, A. (2001). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah* (1st ed.). UPP AMP YPKN.

Hayek, F. A. (2005). The use of knowledge in society. *Readings In The Economics Of The Division Of Labor: The Classical Tradition*, September, 270–284. [https://doi.org/10.1142/9789812701275\\_0025](https://doi.org/10.1142/9789812701275_0025)

Hazarika, B., & Nayak, D. K. (2022). *Fiscal Illusion and Wagner ' s Law* :

*Evidence from Indian Subnational Finances. 367.*

- Hidayat, S. (2008). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif state-society relation. *Poelitik, 1*(1), 1–28.
- Hooghe, L., Marks, G., & Schakel, A. H. (2010). The rise of regional authority: A comparative study of 42 democracies. *The Rise of Regional Authority: A Comparative Study of 42 Democracies, 9780203852*(August 2009), 1–224. <https://doi.org/10.4324/9780203852170>
- Juhro, S., & Trisnanto, B. (2018). Paradigma Dan Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen Indonesia. *Publication-Bi.Org, 1*–40.
- Kampunzu, A. B., Cailteux, J. H. L. H., Kamona, (2009). koridor ekonomi papua dan kepulauan maluku. *Journal of African Earth Sciences, 14*(1), 5–24. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2012.11.011><http://popups.ulg.ac.be>
- Kemenperin. (2020). *Koridor Jawa pacu industri nasional*. <https://kemenperin.go.id/artikel/2813/Koridor-Jawa-pacu-industri-nasional>
- KKP. (2019). *Jumlah Pulau*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X, 1*–29.
- Maggi, E. M., & Ladurner, U. (2009). Federal Features and Financial Decentralization. *Eurac Research*.
- Mangkoesoebroto, G. (2002). *ekonomi publik*. BPFE.
- Miftahul, N., Saftiana, Y., & Wahyudi, T. (2020). *The empirical analysis of fiscal illusion. 6*(23), 1033–1044. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.016>
- Muhyiddin T. Nurlina, M. Irfan Tarmizi, A. Y. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Salemba Empat.



- Neni nurhayati. (2017). Analisis Deteksi Fiscal illusion dengan Pendekatan Revenue Enhancement Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon). *JRKA*, 3(2), 109–119.
- Nst, U. N. A. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi* 94.
- Pratami, putu nandya indah. (2017). Fiscal Illusion Detection and the Effect on Capital Expenditure , Fiscal Decentralization , Economic Growth , and Human Development Index for District / Cities in Bali Province. 8(10), 161–169.
- Rachman, T. (2018a). koridor ekonomi bali dan nusa tenggara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rachman, T. (2018b). koridor ekonomi kalimantan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rachman, T. (2018c). koridor ekonomi sulawesi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rusyid, B. U. (2010). *Deteksi Ilusi Fiskal ( Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008 )*.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Sasana, H. (2011). *Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization*. 18(1), 46–58.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis

- Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia* (1st ed.). PT RajaGrafindo persada.
- Sodik, J. (2007). pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional :studi kasus data panel di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 12.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiani, E., & Mahardhika, A. S. (2020). *The antecedent of regional / district expenditures in central java province*. 22(2), 326–333.
- Todaro, michael p. (2000). *pembangunan ekonomi* (7th ed.). erlangga.
- Worthington, B., Analisis, A., Ilusi, E., & Worthington, A. N. C. W. (1996). *Analisis empiriskal ilusi Fiskal*. 10, 1–36.
- Yulianita Anna, F. M. (2020). *Penerapan Aplikasi Software Pada Penelitian Ilmiah*. Unit Pelaksana Teknis Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Yusuf, E., Gunanto, A., Aisha, F., Afifah, N., & Diponegoro, U. (2021). *Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( Studi Kasus : Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016*. 5(1), 17–27.
- Zulkipli, Nasir Hamzah, J. Z. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. *Paradoks:Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3).